

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2012
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan Penerapannya), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983
- Atul Sarma dan Debabani Chakravarty, *Integrating the Third Tier in the Indian Federal System*, Singapura: Palgrave Macmillan, 2018
- AV. Dicey, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, London: English Language Book Society and Mac Hillan, 2011
- Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Bulan Maret Tahun 2018*, Jakarta, 2018
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004
- Baogong He, *Rural Democracy in China: The Role of Village Elections*, New York: Palgrave Macmillan, 2007
- C. Basri, *Desa Belum Siap Kelola Dana Desa Yang Besar*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Disinopsiskan dari Egon G Guba dan Y. Vonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 2008

- Egon G Guba dan Y. Vonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010
- H. Turmudi, *Desa dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli)*, Surakarta, 2017
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, dalam *Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001
- HLA Hart, *The Concept of Law*, London: the English Language Book Society and Oxford University Press, 1972
- I. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Budaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ikhwan Fahrojih, dkk, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika dan Malang Corruption Watch (MCW), 2005
- Indonesia Corruption Watch*, (2018), *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, 2018
- Indrawati. S. M., *Buku Pintar Dana Desa. Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017
- J.T. Wells, *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection*, 3rd edition. New Jersey: Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2011
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973

- K. Harahap, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Bandung: Grafiti, 2009
- KPK Republik Indonesia, *Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2015
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi “Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)”*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2015
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi
- M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009
- M. Lubis, & Scott, J. C. (Penyunting), *Korupsi Politik (Terjemahan)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Pres 2016
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Maryunani, *Keuangan dan Ekonomi Desa*, Makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2016
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia, 2015
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Seruling Masa, 2009
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armoco, 1984
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011
- R. Klitgaard, *Membasmi Korupsi (Edisi Terj)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2010
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1985
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- S. A. D. Chaeruddin, & Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- S.D.S. Wiyanto, *Agar Dana Desa Terkawal*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, 2014
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Sadu Wasistiono & M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2007
- Sahdan, dkk, *Pengelolaan ADD*, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

- SH. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010
- Sjafrina A., Primayogha, E., & Ramadhana, *Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa!*, Jakarta, 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Sumantri, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, 2011
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- W. Friedman, *Legal Theory*. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1994
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Zakaria dalam Sutoro Eko dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2005

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Permendesa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Jurnal/Makalah/Tesis/Skripsi

Agus Subroto, *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011

B. A. Lailiani, *Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*, JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 2017

Bayu Sukmawan Budiyono, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Byong Man Ahn dan William B. Boyer, "Rural Development and Leadership Patterns in South Korea", *Korean Studies*, Vol. 8, 1984

- Dini, Gemala Sari, *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010
- F. Erlangga, A. Frinaldi, & L. Magriasti, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Paternalistik Terhadap Motivasi Kerjan Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang*, *Jurnal Humanis*, 12(2), 2013
- F. Rahman, Baidhowi, A., & Sembiring, R. A., 2018, *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)*, *Jurnal Integritas*, 4 (1)
- F. Rahman, *Korupsi di Tingkat Desa*, *Jurnal Governance*, 2(1), 2011
- F. S. Pawane, *Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara*, *Jurnal Holistik*, X (18), 2016
- Fathur Rahman, *Korupsi di Tingkat Desa*, *Jurnal Governance*, 2(1), 2011
- H. C. Haryanto & T. Rahmania, *Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik?*, *Jurnal Psikologi*, 42(3), 2015
- H. Kusmanto, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 2013
- H. Turmudi, *Desa dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli)*, *Jurnal*, Surakarta, 2017
- Hayat & Makhmudah, M., *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam*, *Jurnal Yustisia*, 5 (2), 2016
- Hayat, Mar'atur Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, *Yustisia Edisi 95, Mei-Agustus 2016*
- Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001
- I. P. Sari, *Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara)*, *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 2016
- Indonesia Corruption Watch*, (2018), *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik, 2018*

- Kristendo Sumolang, *Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. VI/ No. 1/Jan-Feb/2017
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi “Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)”*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2015
- Kushandajani, *Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, Jurnal Yustisia, 4(2), 2015
- La Tarifu S. Romanus, *Peran Komunikasi Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 2017
- M. Bernie, *Korupsi dan Tak Optimalnya Dana Desa Kurangi Pengangguran*, Tirto.Id, <https://tirto.id/korupsi-dan-tak-optimalnya-dana-desa-kurangi-pengangguran-c9oJ>, 2018, diakses pada tanggal 10 Maret 2021
- Mahfudz, *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 5(1), 2009
- Maryunani, *Keuangan dan Ekonomi Desa*, Makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006
- Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma
- Mohammad Zain A. Gafur, *Inkonsistensi Penerapan Goodgovernance dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Marasipno Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur)*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- N. Wibisono, & Purnomo, H., *Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun*, Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 2(1), 2017
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

- P. P. Bachtiar, *Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa*, Smeru Catatan Kebijakan, 2 (Agustus), 2016
- Paulus Israwan Setyoko, *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 2011
- Puguh Hermawan, *Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Publik (Studi Kasus: 38 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2006-2010)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Ray Septianis Kartika, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*, Jurnal Bina Praja, 4(3), 2012
- Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. XVI (Desember, 2014
- S. Kasus, M. Agung, N. O. K. Pid, A. Sabputera, & F. Wijaya, *BUMN yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa A, Latar Belakang Samuel P. Huntington seorang ilmuwan politik asal Amerika pernah menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dari modernitas, 1 Di era modern saat ini , fakta yang terjadi di lapangan, 1964*, 2015
- Sahrir, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2017
- Saparin dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 6
- Seok-Jin Eon, "Synergy between State and Rural Society for Development: An Analysis of the Governance System of the Rural Saemaul Undong in Korea", *Korea Observer*, Vol. 42, No. 4, Winter, 2011
- Sukei, *Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa Di Kabupaten Pacitan*, Jurnal Ilmiah, Universitas Dokter Sutomo, Surabaya, Vol. 1 Desember Tahun 2007
- W. Astuti, & A. Hardiana, *Perencanaan Partisipatif Pada Tingkat Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kumuh Perkotaan*, Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 20(2), 2009
- Y. Kadir, & Moonti, R. M, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, 6(3), 2018

Internet

Ambon Ekspres, *Kemendagri, Esensi UU Desa Mandirikan Masyarakat Lokal*, dari <http://www.ambonekspres.com/index.php/aekonomi/item/3245-kemendagri-esensi-uu-desa-mandirikan-masyarakat-lokal>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

Aryadji, *Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW*, <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rakor Penyusunan RPJMN Dan RKP Pembangunan Perdesaan*, <http://www.trp.or.id/detailberita/246/Rakor-Penyusunan-RPJMNdand-RKP-Pembangunan-Perdesaan.html>, diakses 15 Maret 2021

Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 (No. 56/07/)*, Badan Pusat Statistik RI, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, 2020, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

D. Istimora, *97,27 Persen Korupsi Dana Desa Oleh Kades dan Istri*, Retrieved from http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/337543/97,27_persen_korupsi_dana_desa_oleh_kades_dan_istri.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

Desa.id, *Lembaga Kemasyarakatan Desa*, Desa.Id. <http://majasari.desa.id/lembaga-des/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

Edi Suwiknyo, *Tahun Pilkada & Pemilu : ICW Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Diperketat*, <https://finansial.bisnis.com/read/20180205/9/734703/tahun-pilkada-pemilu-icw-minta-pengawasan-penggunaan-dana-desa-diperketat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_fajar_\(politik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_fajar_(politik)) , diakses 25 Maret 2021

<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor-penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw?page=2>

- Jurnal Publik. Operasional kelurahan., dari <http://www.jurnalpublik.com/index.php/beritakecamatan/115-4-m-operasional-kelurahan->, diakses pada tanggal 10 Maret 2021
- Kasus Bethany, *Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan*, <http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>, diakses pada hari Selasa, 12 Januari 2021, Jam 14.00 WIB
- Kurniawan Bernhard, *Kades Aktor Korupsi Dana Desa*, <https://www.suarapemredkalbar.com/index.php/berita/kuburaya/2018/04/02/kades-aktor-korupsi-dana-desa>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021
- M. Bernie, *Korupsi dan Tak Optimalnya Dana Desa Kurangi Pengangguran*, Tirto.Id, <https://tirto.id/korupsi-dan-tak-optimalnya-dana-desa-kurangi-pengangguran-c9oJ>, 2018, diakses pada tanggal 10 Maret 2021
- Menjembatani Penelitian dan Kebijakan, dikutip dari <http://www.smeru.or.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021
- MI Dani Putra, Teori Chambliss & Seidman, <http://daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori-chambliss-seidman.html?m=1>, diposkan 4th October 2012, diakses pada 12 Januari 2021, Pukul 16.59 WIB
- Riza M. Irfansyah, *Tingkatkan Kapasitas Perangkat Desa Lewat Pelatihan Dan Bimtek*, <http://fokusjabar.com/2016/06/16/tingkatkan-kapasitas-perangkat-desa-lewat-pelatihan-dan-bimtek/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021
- Suryarama, *Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab)*. Universitas Terbuka, 2012, hlm.10, <http://repository.ut.ac.id/2464/1/fisip201215.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021
- T. Yulianto, *Mewujudkan Desa Nol Korupsi*, Suara Merdeka, https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10-hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf, 2017
- Tujuan Hukum, <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses pada hari Selasa, 12 Januari, Jam 14.00 WIB
- W. Astuti, & A. Hardiana, *Perencanaan Partisipatif Pada Tingkat Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kumuh Perkotaan*, Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 20(2), 2009
- W. T. Mardyanto, *Problematika Posisidan Kelembagaan Desa*, from <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/otonomidaerah/276proble>

[matika-posisi-dan-kelembagaan-desa\(2014\)](#), diakses pada tanggal 10 Maret 2021

www.investigasi.or.id. Ciri-ciri korupsi, diakses pada Tanggal 10 Maret 2021

